

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

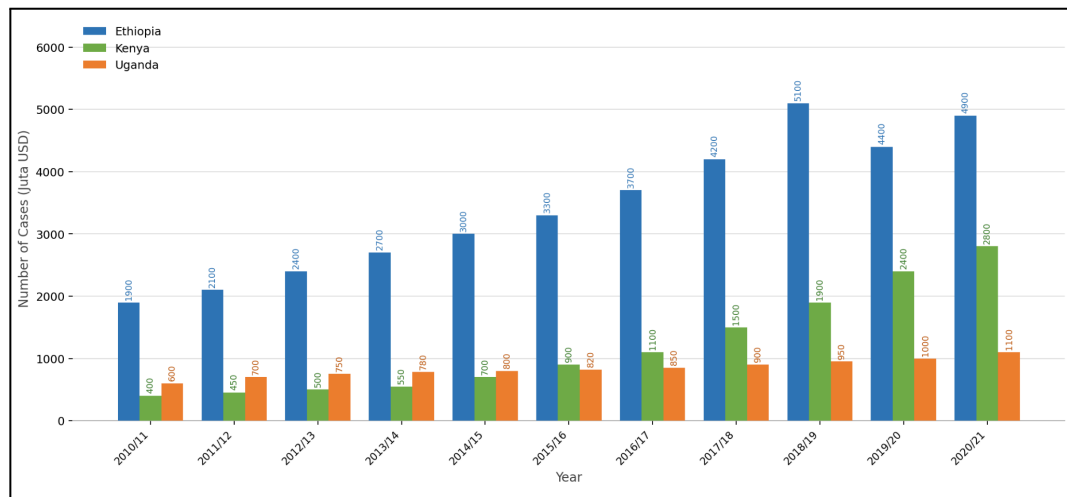
Migrasi internasional telah menjadi salah satu dinamika terpenting dalam sistem global kontemporer, tidak hanya sebagai isu sosial, tetapi juga sebagai isu ekonomi dan politik. Definisi Migrasi Internasional itu sendiri yaitu suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya (Kritz, 1992). Dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional, migrasi internasional merupakan suatu aktivitas perpindahan penduduk yang melingkupi aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan untuk menetap ataupun sementara berada di daerah tujuan (Elisabeth, 2013).

Tidak hanya berbicara tentang perpindahan penduduk, migrasi juga terhubung dengan relasi ekonomi dan politik antara kelompok negara yang berbeda, sekaligus membentuk hasil dari relasi ekonomi dan politik tersebut. Transformasi tatanan ekonomi dan politik internasional yang sedang berlangsung, skala aktivitas transnasional yang semakin besar dari pemerintah, korporasi, organisasi swasta, serta institusi lain, ditambah dengan jaringan sosial para migran, semuanya berkontribusi pada pertumbuhan sistem migrasi. Pertumbuhan sistem migrasi yang kerap meningkat seringkali dapat dilihat pada negara dunia ketiga dikarenakan adanya kesenjangan angka serta kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ethiopia sebagai salah satu pengirim tenaga kerja penting di Afrika (terutama ke Timur Tengah dan Afrika Selatan), tercatat memiliki sekitar 2 juta warga ($\pm 2,1\%$ populasi) pada 2015 yang memegang status sebagai imigran yang didorong oleh berbagai faktor mulai dari kurangnya mata pencaharian akibat kekeringan hingga perang saudara di negaranya (Redehegn, 2019). *National Bank of Ethiopia* menunjukkan bahwa pada tahun 2020/2021 Ethiopia menerima sekitar US\$5 miliar

remitansi yang berkontribusi sekitar 4,5 persen terhadap PDB Ethiopia. Pada 2018/2019, remitansi Ethiopia mencapai tingkat tertinggi sebesar US\$5,3 miliar, tetapi kemudian menurun menjadi US\$4,3 miliar pada 2019/2020 dan kembali pulih pada 2020/2021 hingga sekitar US\$5 miliar (World Bank, 2022).

Grafik 1.1 Perkembangan Remitansi Sektor Jasa di Ethiopia, Uganda, dan Kenya dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja (2011–2021)



Sumber: *World Bank Document, 2022*

Meskipun sektor jasa daerah urban telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional Ethiopia, pertumbuhan sektor jasa ini tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah atau dari kawasan pedesaan. Sebagian besar tenaga kerja di bidang jasa formal seperti keuangan, telekomunikasi, teknologi informasi yang berlokasi di kota besar seperti Addis Ababa membutuhkan keterampilan yang relatif tinggi (Mueller, 2019). Maka dari itu, peluang pekerjaan yang layak di sektor jasa formal masih tetap terbatas bagi banyak perempuan yang berasal dari pedesaan.

Di sektor pertanian yang juga turut menyumbang bagian dari PDB Ethiopia secara signifikan, masih dinilai terlalu tradisional dan berisiko karena masih

bergantung pada cuaca yang seringkali menghadapi tantangan iklim (seperti kekeringan) dan memiliki produktivitas yang relatif rendah. Keterbatasan kesempatan di sektor pertanian dan jasa inilah yang menyebabkan penduduk Ethiopia melihat migrasi sebagai strategi ekonomi keluar dari situasi domestik yang terbatas (Mueller, 2019).

Arab Saudi muncul sebagai salah satu tujuan utama bagi pekerja migran Ethiopia yang sedang mencari pekerjaan dikarenakan faktor ketersediaan lapangan kerja dan kedekatan geografis, serta ikatan dan jaringan historis, di mana banyak dari mereka berharap mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar di Arab Saudi dibandingkan dengan di kampung halamannya. Arab Saudi tercatat sebagai negara dengan permintaan pekerja domestik migran tertinggi di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC), dengan jumlah mencapai sekitar 828.425 pekerja domestik pada tahun 2012. Tingginya permintaan tersebut mendorong pemerintah Ethiopia untuk menginisiasi program perekrutan massal yang menargetkan hingga sekitar 500.000 tenaga kerja, khususnya perempuan, untuk bekerja di sektor domestik di Arab Saudi (Zelalem, 2023). Dalam konteks ini, Ethiopia menjadi salah satu negara utama yang mengirim pekerja migran domestik perempuan di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Lebanon (Busza, 2023). Fenomena ini mencerminkan bahwa migrasi tenaga kerja perempuan Ethiopia ke sektor domestik tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi domestik, tetapi juga oleh tingginya permintaan struktural di negara-negara tujuan.

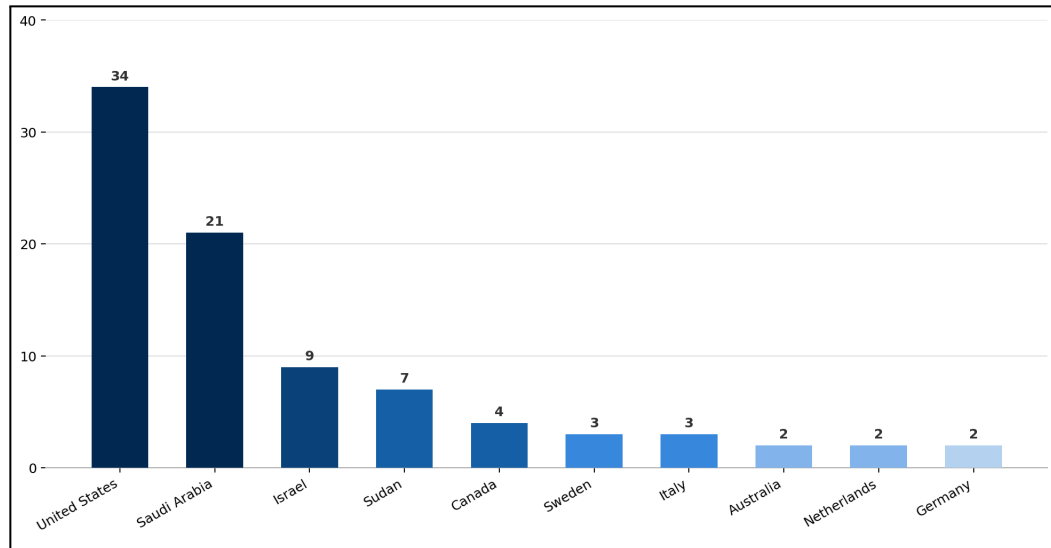
Arab Saudi menjadi negara yang dipertimbangkan untuk bermigrasi karena meskipun gaji yang tidak cukup tinggi menurut standar internasional secara umum, tetapi secara relatif jauh lebih tinggi dibandingkan peluang yang tersedia di Ethiopia. Survei menunjukkan bahwa rata-rata gaji pekerja domestik Ethiopia di Arab Saudi sekitar US \$250 per bulan, jauh di atas rata-rata upah yang mereka dapatkan di Ethiopia (Zelalem, 2023). Keuntungan pendapatan yang besar ini, beserta remitansi yang dihasilkan, dapat meningkatkan tabungan rumah tangga migran, sehingga memperkuat kemampuan mereka untuk mengantisipasi guncangan di masa depan.

Lebih jauh lagi, migrasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan seumur hidup migran dengan membangun modal awal yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan kewirausahaan di kampung halaman (UNCTAD, 2018).

Dengan demikian, remitansi yang dihasilkan oleh pekerja migran baik legal maupun ilegal turut menjadi faktor krusial. Pekerja migran ilegal Ethiopia memberikan kontribusi pada perekonomian Ethiopia, terutama melalui remitansi yang mereka kirimkan kepada keluarga di kampung halaman (Kefale & Mohammed, 2018). Meskipun pendapatan mereka tidak tertulis secara resmi dalam PDB, karena PDB hanya menghitung produksi ekonomi di dalam negeri, remitansi yang dikirim, baik melalui jalur formal maupun informal, tetap menjadi sumber devisa penting yang memperkuat cadangan valuta asing, menstabilkan nilai tukar, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan mendorong pembangunan lokal (Kefale & Mohammed, 2018). Migran ilegal biasanya memanfaatkan jalur pengiriman uang informal dimana kontribusi mereka seringkali tidak tercatat dalam statistik resmi melainkan secara ekonomi nyata, mereka tetap menyumbang pada GNI dan ketahanan ekonomi Ethiopia. Data dari UNCDF menunjukkan bahwa Ethiopia memperoleh sekitar USD 5 miliar remitansi per tahun, menjadikan arus uang kiriman baik dari pekerja legal maupun ilegal sebagai salah satu pilar penting perekonomian negara.

Tercatat bahwa sekitar empat perlima remitansi Ethiopia berasal dari hanya sepuluh negara. Hal ini tidak mengherankan mengingat sejarah emigrasi Ethiopia ke Amerika Serikat pada dekade 1980-an, Ethiopia menerima sekitar sepertiga dari total remitansi dari Amerika Serikat. Namun demikian, Arab Saudi juga merupakan sumber remitansi yang sangat penting karena banyaknya warga Ethiopia yang pergi ke negara tersebut sebagai pekerja migran internasional dan sekitar seperlima dari total remitansi berasal dari Arab Saudi. Negara lain yang juga menyumbang porsi remitansi yang relatif besar adalah Israel (9 persen) dan Sudan (7 persen) (World Bank, 2022).

Grafik 1.2 Negara-Negara Penyumbang Utama Remitansi ke Ethiopia (2021)



Sumber: UNCDF, 2021

Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik diatas, terlihat bahwa sekitar empat perlima remitansi Ethiopia berasal dari sepuluh negara utama tujuan migrasi. Amerika Serikat berada di posisi teratas sebagai penyumbang remitansi terbesar dengan kontribusi sekitar 34 persen dari total remitansi. Tingginya kontribusi ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang emigrasi Ethiopia ke Amerika Serikat sejak dekade 1980-an, membentuk komunitas diaspora yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, Arab Saudi turut menjadi sumber remitansi terbesar kedua dengan kontribusi sekitar 21 persen, menunjukkan tingginya jumlah pekerja migran Ethiopia yang bekerja di negara tersebut, khususnya di sektor domestik.

Israel dan Sudan juga menjadi negara kontributor yang relatif signifikan, masing-masing sebesar sekitar 9 persen dan 7 persen. Hal ini mencerminkan bahwa kawasan Timur Tengah dan Afrika Timur masih menjadi tujuan utama migrasi tenaga kerja Ethiopia. Sementara itu, negara-negara lain seperti Kanada, Swedia, Italia, Australia, Belanda, dan Jerman memberikan kontribusi yang lebih kecil.

Besarnya kontribusi remitansi yang masuk ke Ethiopia tidak dapat dilepaskan dari dinamika migrasi tenaga kerja Ethiopia ke negara-negara tujuan utama. Meskipun remitansi berperan signifikan dalam menopang perekonomian nasional dan rumah tangga di Ethiopia, arus migrasi yang menyertainya juga membawa konsekuensi serius, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan pekerja migran. Dalam konteks ini, Arab Saudi menempati posisi yang paradoks yakni sebagai salah satu sumber remitansi terbesar, sekaligus sebagai negara tujuan yang memiliki risiko pelanggaran hak pekerja migran Ethiopia, baik pada tahap pra-keberangkatan, perjalanan migrasi, maupun selama masa kerja.

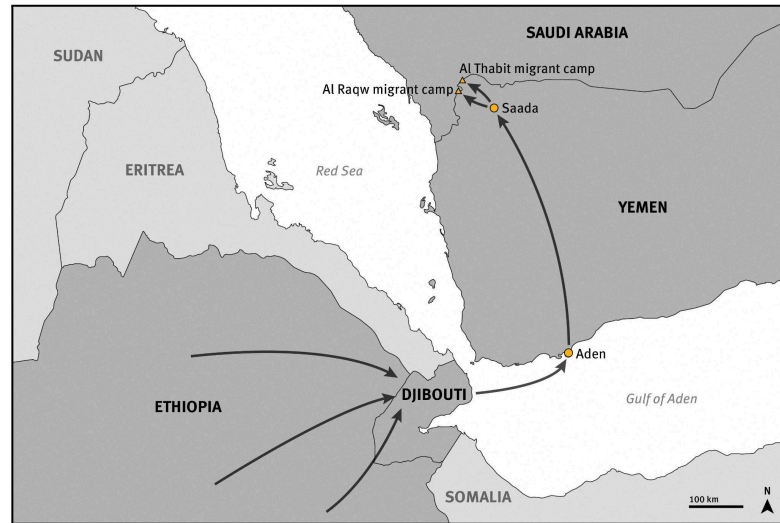
Tingginya gelombang migrasi tenaga kerja Ethiopia menuju Arab Saudi tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor ekonomi semata, melainkan juga dapat dilihat dari hasil interaksi berbagai faktor struktural, sosial, dan kultural. Selain keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan domestik, migrasi juga dipengaruhi oleh ekspektasi sosial, jaringan migran sebelumnya, serta normalisasi migrasi sebagai strategi bertahan hidup di komunitas asal. Dalam konteks ini, faktor rasial turut memainkan peran penting dalam membentuk posisi pekerja migran Ethiopia di negara tujuan. Pasar tenaga kerja di negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, menunjukkan adanya segmentasi dan hierarki pekerjaan migran yang bersifat rasial dan nasionalitas, yang membagi pekerja ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan asal negara dan stereotip sosial (Fernandez, 2021). Pekerja migran dari negara Barat dan Arab umumnya menempati posisi profesional dan manajerial (high-skilled expatriates), pekerja dari Asia Selatan dan Asia Tenggara banyak mengisi sektor konstruksi dan manufaktur (semi-skilled workers), sementara migran dari Afrika Sub-Sahara, termasuk Ethiopia, secara dominan ditempatkan dalam sektor domestik dan pekerjaan berupah rendah (low-skilled domestic workers) seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan pekerja kebersihan (Fernandez, 2021).

Sebagai migran berkulit hitam dari Afrika Sub-Sahara, pekerja Ethiopia sering kali ditempatkan di lapisan terbawah dalam hierarki ini dan mengalami diskriminasi berbasis ras, stereotip negatif, serta perlakuan subordinatif dibandingkan pekerja

migran dari kawasan lain. Literatur melihat fenomena ini sebagai *racialized labor system*, yaitu sistem ketenagakerjaan yang menghubungkan nilai kerja dan status sosial dengan ras dan kebangsaan. Relasi kuasa berbasis ras ini memperkuat kerentanan mereka terhadap eksploitasi, kekerasan, dan tindakan tidak manusiawi, baik dalam proses perekrutan maupun selama bekerja di Arab Saudi (Fernandez, 2021).

Dalam proses migrasi, pekerja migran Ethiopia yang berangkat secara legal menuju Arab Saudi tidak melewati jalur darat Djibouti–Yaman, karena seluruh proses migrasi resmi dilakukan melalui penerbangan langsung setelah mereka memperoleh kontrak kerja, visa, dan pelatihan pra-keberangkatan yang difasilitasi oleh agen tenaga kerja terdaftar. Sedangkan pekerja migran ilegal Ethiopia harus melalui rute migrasi utama bagi warga Ethiopia ke Arab Saudi melalui Teluk Aden dan wilayah Yaman yang dikenal sebagai "Rute Timur" atau "Rute Yaman" (Human Rights Watch, 2019). Rute tersebut dikenal sebagai rute berbahaya bagi para pekerja migran ilegal Ethiopia karena memiliki berbagai pelanggaran oleh para penyelundup, pedagang manusia, dan pihak berwenang Yaman yang memeras dan menganiaya para migran. Mereka meninggalkan daratan Ethiopia dan menuju ke pelabuhan di Djibouti, kemudian menyeberang Laut Merah atau Teluk Aden ke Yaman menggunakan kapal yang disediakan oleh penyelundup (*smugglers*).

Gambar 1.1 Rute Migrasi Tidak Resmi Pekerja Migran Ethiopia melalui



Sumber: Reuters.com, 2023

Perjalanan laut yang dilakukan oleh para migran Ethiopia menuju Yaman merupakan fase migrasi yang sangat berisiko. Kondisi kapal umumnya kelebihan muatan, kekurangan air minum dan makanan, serta tidak dilengkapi standar keselamatan yang memadai. Dalam satu perjalanan, sebuah kapal dapat mengangkut ratusan migran dan berlayar di tengah gelombang besar. Human Rights Watch (2019) menyatakan bahwa kondisi ini telah berulang kali mengakibatkan kecelakaan laut dan kematian massal.

Wilayah transit di Yaman memiliki risiko lanjutan bagi migran Ethiopia. Migran seringkali menjadi sasaran jaringan penyelundup dan perdagangan manusia melalui praktik penahanan sewenang-wenang, pemerasan uang tebusan dari keluarga di Ethiopia, serta kekerasan fisik. Migran dikelompokkan ke berbagai etnis dan dipindahkan ke Gubernuran Saada, wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata Houthi. Migran Tigray ditempatkan di pemukiman Al Raqw, sedangkan migran

Oromo ditempatkan di kamp Al Thabit. Kamp-kamp tersebut menampung puluhan ribu migran yang menunggu kesempatan untuk menempuh perjalanan ke Arab Saudi. Dalam konteks konflik bersenjata dan instabilitas politik di Yaman, migran berada dalam kondisi sangat rentan terhadap pelecehan, penculikan, dan kekerasan oleh kelompok bersenjata, sementara akses terhadap mekanisme perlindungan hampir tidak tersedia.

Risiko tinggi juga melekat pada rute darat dari Yaman menuju perbatasan Arab Saudi. Migran harus melewati wilayah pegunungan terpencil dan dilaporkan menjadi sasaran penembakan oleh penjaga perbatasan Arab Saudi ketika mencoba menyeberang secara tidak resmi. Kesaksian migran menjelaskan keberadaan mayat di sepanjang jalur perjalanan, serta praktik pemaksaan untuk membawa barang ilegal sebagai syarat melanjutkan perjalanan (Human Rights Watch, 2019).

Menurut International Organization for Migration (IOM) dan laporan media, sejumlah kapal migran terbalik di perairan sekitar Djibouti dan Yaman, yang menyebabkan ratusan orang hilang atau meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadikan *Eastern Corridor*, jalur migrasi internasional utama yang menghubungkan Afrika Timur dan Tanduk Afrika dengan Yaman serta negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi sebagai salah satu koridor migrasi paling berbahaya di dunia (Human Rights Watch, 2019).

Kerentanan pekerja migran Ethiopia berlanjut di negara tujuan. Akses terhadap mekanisme keadilan terbatas akibat hambatan bahasa, keterbatasan sumber daya ekonomi, minimnya bantuan hukum, serta proses peradilan yang panjang. Ketidakadilan struktural ini didorong oleh kerangka hukum di sebagian besar negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang mengecualikan pekerja rumah tangga migran dari undang-undang ketenagakerjaan umum serta menerapkan sistem sponsor (*kafala*) yang memberikan kontrol luas kepada majikan dan negara atas pekerja migran (International Trade Union Confederation, 2017).

Di antara kelompok migran tersebut, perempuan pekerja migran baik yang berstatus resmi maupun tidak turut menjadi kelompok yang paling terdampak.

Mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, Lebanon, dan negara-negara Teluk lainnya dengan jam kerja panjang, tanpa perlindungan hukum yang memadai, serta berada dalam kondisi rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual dari majikan. Situasi ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja Ethiopia tidak dapat dilepaskan dari dimensi gender. Kerentanan perempuan migran semakin diperjelas oleh penerapan sistem kafala, yaitu sistem *sponsorship* tenaga kerja yang mengikat pekerja migran pada majikan atau sponsor di negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain, Irak, Yordania, dan Lebanon (Bajracharya, 2012).

Dalam sistem kafala, pekerja migran masuk ke negara tujuan di bawah tanggung jawab finansial dan hukum dari seorang majikan tertentu, dan wajib bekerja pada majikan yang sama selama masa kontrak. Tujuan utama dari sistem ini yaitu guna melindungi kepentingan majikan Arab yang menanggung biaya perekrutan pekerja migran, dan mencegah pekerja migran menetap secara permanen di negara tujuan (Pande, 2012). Disamping tujuannya, realitanya, sistem kafala secara struktural mendorong dan memperparah tindakan pelecehan serta eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan karena sistem ini menempatkan kekuasaan penuh di tangan majikan, sementara pekerja hampir tidak memiliki perlindungan hukum. Selain itu, sistem kafala menetapkan status hukum pekerja migran sepenuhnya bergantung pada sponsor atau majikan mereka dimana mereka tidak dapat mengganti pekerjaan, berpindah tempat tinggal, atau meninggalkan negara tanpa izin majikan (Pande, 2012).

Ketergantungan ini membuat banyak pekerja domestik tidak mampu untuk melaporkan kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau eksploitasi kerja, karena tindakan itu bisa berujung pada deportasi atau penahanan. Selain itu, pekerja rumah tangga yang mayoritas merupakan perempuan dari negara-negara seperti Ethiopia, tidak termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional di sebagian besar negara Teluk. Akibatnya, mereka tidak memiliki hak atas jam kerja wajar, cuti, upah lembur, atau akses pada mekanisme pengaduan formal. Kondisi migran perempuan

juga diperparah dengan kondisi kerja tertutup di rumah majikan yang memperburuk risiko kekerasan dan isolasi sosial (Bajracharya, 2012).

Sistem kafala juga menciptakan situasi semacam kerja paksa, karena paspor dan dokumen identitas pekerja sering disita oleh majikan sebagai bentuk “jaminan.” Dalam banyak kasus, pekerja dipaksa bekerja tanpa istirahat, tidak dibayar selama berbulan-bulan, dan tidak dapat pulang ke negara asal mereka. Untuk mengatasi kasus kesenjangan perlindungan yang terbentuk oleh sistem tersebut, tentunya perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kafala yang telah lama menjadi fondasi hubungan kerja antara pekerja migran dan majikan di negara-negara Teluk.

Pada tahun 2016, pemerintah Ethiopia mulai menyadari tingginya risiko eksploitasi tenaga kerja migran di negara tujuan, termasuk Arab Saudi. Respon awal ini terlihat dalam bentuk revisi kebijakan mandiri, seperti perubahan terhadap *Overseas Employment Proclamation* (Proklamasi Ketengakerjaan Luar Negeri) 923/2016, yang mempertegas regulasi perekrutan tenaga kerja migran melalui *bilateral labour agreements* (BLA) dengan negara tujuan seperti Arab Saudi, serta mewajibkan pelatihan pra-keberangkatan dan kontrak kerja tertulis bagi calon pekerja untuk meningkatkan perlindungan mereka sebelum berangkat kerja. BLAs ini merupakan instrumen legal untuk menegaskan hak dan kewajiban pekerja serta syarat kerja di negara penempatan (Federal Negaret Gazeta, 2016).

Pada Maret 2022, pemerintah Ethiopia mengambil langkah yang lebih terkoordinasi bersama Arab Saudi dalam bentuk kesepakatan repatriasi besar-besaran yaitu lebih dari 100.000 warga Ethiopia yang tinggal secara tidak teratur di Arab Saudi dipulangkan melalui operasi yang disepakati kedua negara, sebagai respons terhadap laporan pelanggaran kondisi penahanan, kekerasan, dan eksploitasi yang dialami migran di fasilitas detensi Arab Saudi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan IOM dan mitra global lainnya dan mencerminkan pendekatan diplomatik Ethiopia untuk melindungi warganya yang rentan. Namun, sepanjang 2022-2023, kampanye repatriasi tersebut tidak efektif menghentikan migrasi ilegal, sehingga pemerintah Ethiopia juga menekankan perlu adanya penanggulangan faktor

pendorong migrasi dan penindakan terhadap jaringan penyelundupan migran, meskipun kebijakan ini lebih bersifat keamanan daripada perlindungan hak migran. Migran yang dipulangkan biasanya diarahkan ke pusat rehabilitasi di Addis Ababa, namun keterbatasan sumber daya dan pengawasan pasca kepulangan menghambat sistem pemantauan dan reintegrasi yang efektif, sehingga banyak yang kembali ke Arab Saudi melalui jalur serupa (ENACT Africa, 2023).

Pada 2025, pemerintah Ethiopia terus mengimbau warganya untuk menghindari jalur migrasi ilegal karena risiko kekerasan struktural dan bahaya perjalanan melalui rute Yemen–Saudi, serta mendesak pencarian *legal pathways* melalui perekrutan resmi dan perjanjian bilateral yang lebih kuat. Pemerintah bahkan mengeluarkan peringatan publik untuk tidak menggunakan jasa *trafficking* dan pemanfaatan jalur tidak resmi ketika migran menghadapi kasus seperti pembajakan, kekerasan, atau kematian dalam perjalanan menuju Arab Saudi (Birhane, 2025).

Sepanjang periode ini, respon Ethiopia mencerminkan kombinasi kebijakan legal (peraturan perekrutan, kontrak kerja, BLA), diplomasi bilateral (repatriasi massal dengan Arab Saudi), dan advokasi untuk perlindungan migran. Meskipun demikian, Ethiopia masih menghadapi keterbatasan implementasi terutama dalam menangani migrasi ilegal dan reintegrasi pasca pulang. Keterbatasan perlindungan dari negara asal tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural di negara tujuan. Dinamika kebijakan Arab Saudi sebagai negara penerima tenaga kerja migran membentuk kondisi kerja yang secara langsung mempengaruhi tingkat kerentanan pekerja migran perempuan Ethiopia terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Sejak pengumuman Saudi Vision 2030 pada 25 April 2016, pemerintah Arab Saudi menetapkan reformasi pasar tenaga kerja sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi dan tata kelola negara, termasuk upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sistem kafala yang selama puluhan tahun menahan pekerja migran pada kontrol majikan (Saudi Arabia ABC, 2016). Arah reformasi ini mulai diterjemahkan secara konkret pada 2020, ketika Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (MHRSD) mengeluarkan *Labour Reform Initiative* (LRI)

sebagai bagian dari implementasi Vision 2030 (Naar, 2020). Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan pada Maret 2021, memberikan pekerja migran sektor formal hak terbatas untuk berpindah pekerjaan dan keluar-masuk negara tanpa persetujuan langsung majikan, serta memindahkan sebagian kontrol administratif dari sponsor individual ke negara melalui sistem digital (Human Rights Watch, 2021). Reformasi ini kemudian diperkuat dengan adanya digitalisasi hubungan kerja dengan peluncuran dan perluasan penggunaan platform resmi seperti Qiwa, yang mewajibkan pencatatan kontrak kerja secara elektronik melalui pengawasan MHRSD, dengan klaim meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hubungan kerja (Saudi Gazette, 2021). Puncaknya, pada 2025, pemerintah Saudi secara resmi meluncurkan penghapusan sistem kafala dan penggantian relasi patronase tradisional dengan kerangka kerja berbasis kontrak digital, yang diklaim memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pekerja migran, meskipun berbagai laporan menjelaskan bahwa implementasi reformasi ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya meliputi kelompok pekerja paling rentan, khususnya pekerja domestik migran perempuan (Walk Free, 2025).

Meskipun berbagai studi dan laporan telah menganalisis migrasi tenaga kerja Ethiopia, sistem kafala, serta reformasi ketenagakerjaan di Arab Saudi, sebagian besar hasil analisis tersebut masih berfokus pada aspek kebijakan makro, perlindungan hukum formal, dan narasi reformasi negara. Di sisi lain, berbagai temuan empiris justru menunjukkan adanya anomali yang signifikan, yaitu keberlanjutan praktik eksploitasi, diskriminasi rasial, dan kekerasan terhadap pekerja domestik migran perempuan Ethiopia di tengah rencana penghapusan sistem kafala dan modernisasi pasar tenaga kerja pasca Vision 2030. Ketidaksesuaian antara kerangka regulatif yang semakin progresif dengan realitas kerja yang masih eksploitatif ini belum banyak dianalisis secara mendalam dalam literatur yang ada.

Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan dimensi hierarki rasial, relasi gender, migrasi ilegal, serta implementasi kebijakan ketenagakerjaan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Minimnya kajian yang menghubungkan perspektif negara asal dan negara tujuan secara simultan juga

menyebabkan pemahaman tentang kerentanan struktural pekerja migran perempuan Ethiopia masih bersifat parsial. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan anomali antara wacana reformasi dan praktik lapangan, sekaligus mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis bagaimana relasi kuasa berbasis ras, gender, dan kebijakan migrasi terus mereproduksi eksploitasi dalam konteks yang secara formal telah mengalami reformasi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat bahwa fenomena migrasi tenaga kerja internasional, khususnya yang melibatkan pekerja perempuan Ethiopia di bawah sistem kafala di Arab Saudi, tidak hanya menunjukkan ketimpangan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memperlihatkan dinamika eksploitasi kelas dan gender dalam sistem ekonomi global. Untuk memahami kompleksitas fenomena ini secara lebih mendalam, maka muncullah pertanyaan penelitian,

1. Bagaimana ketimpangan gender terwujud dalam pengalaman pekerja migran perempuan Ethiopia di Arab Saudi?
2. Bagaimana praktik eksploitasi dan kekerasan yang dialami pekerja migran perempuan Ethiopia di Arab Saudi memiliki keterkaitan dengan struktur kekuasaan dalam sistem kafala?
3. Bagaimana relasi Ethiopia - Arab Saudi dalam struktur *global care chain* masih menyebabkan ketidakadilan gender terhadap pekerja migran perempuan pasca dikeluarkannya reformasi kebijakan sistem kafala?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis sistem kafala di Arab Saudi dan dampaknya terhadap pekerja migran perempuan asal Ethiopia, dengan menggunakan

pendekatan Neo-Marxisme, *World System Theory*, dan konsep *Global Care Chain*. Kajian difokuskan pada bagaimana relasi antara kelas, gender, dan kekuasaan ekonomi terwujud dalam praktik kerja migran rumah tangga di bawah sistem kafala, serta bagaimana reformasi kebijakan yang dilakukan Arab Saudi termasuk dalam kerangka Vision 2030 dapat dibaca sebagai bentuk reproduksi kapitalisme patriarki dalam wujud yang lebih modern atau “manusiawi.” Secara temporal, penelitian ini mencakup periode 2015-2025, yaitu masa dimulainya negosiasi bilateral antara Ethiopia dan Arab Saudi, diikuti dengan berbagai upaya reformasi dalam sistem rekrutmen dan perlindungan tenaga kerja migran, hingga diperkenalkannya reformasi ketenagakerjaan dan pengumuman rencana penghapusan sistem kafala secara bertahap. Secara spasial, penelitian dibatasi pada konteks Arab Saudi sebagai salah satu negara Teluk dengan populasi pekerja migran terbesar di kawasan tersebut, dan Ethiopia sebagai salah satu negara pengirim utama pekerja domestik perempuan. Penelitian ini tidak bermaksud untuk membahas keseluruhan sistem ketenagakerjaan di negara Teluk secara umum, maupun seluruh dinamika politik domestik Arab Saudi. Fokus utama tetap diarahkan pada dimensi gender dan kelas dalam relasi kerja kafala, serta bagaimana kebijakan reformasi mencerminkan kontinuitas dan transformasi dominasi kapitalisme patriarki di era globalisasi.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana ketimpangan gender terbentuk, dialami, dan direproduksi dalam kehidupan pekerja migran perempuan Ethiopia di Arab Saudi, khususnya dalam konteks sistem kafala yang mengatur relasi kuasa antara pekerja dan sponsor. Dengan melihat pengalaman sehari-hari, bentuk-bentuk kekerasan, serta perbandingan kondisi sosial dan gender di negara asal dan negara tujuan, penelitian ini berupaya mengungkap mekanisme

struktural yang membuat perempuan Ethiopia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana ketimpangan gender terwujud dalam pengalaman pekerja migran Ethiopia di Arab Saudi.
2. Menjelaskan bagaimana praktik eksploitasi dan kekerasan yang dialami pekerja migran perempuan Ethiopia di Arab Saudi memiliki keterkaitan dengan struktur kekuasaan dalam sistem kafala.
3. Mengidentifikasi relasi Ethiopia - Arab Saudi dalam struktur *global core chain* masih menyebabkan ketidakadilan gender pasca dikeluarkannya rencana reformasi kebijakan sistem kafala.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian feminisme kritis dengan memperluas ruang analisisnya pada isu migrasi internasional dan sistem kerja kafala. Penelitian ini turut memperkaya studi hubungan internasional, ekonomi politik, dan kajian gender, khususnya dalam memahami bagaimana relasi kekuasaan patriarki dan kapitalisme global saling berkelindan serta direproduksi melalui kebijakan migrasi dan struktur kerja lintas negara.
2. Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1) dan diharapkan menjadi bahan masukan bagi lembaga pemerintah, organisasi internasional, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja migran, khususnya perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap kondisi kerja dan berbagai bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran perempuan dalam kerangka sistem kafala. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan wacana kritis serta advokasi kebijakan menuju reformasi struktural sistem

migrasi internasional yang lebih menjamin hak, martabat, dan keadilan bagi perempuan pekerja di ranah global.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Ketimpangan gender dalam ekstraksi tenaga reproduksi global dapat dilihat sebagai kondisi ketika relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara berpotensi terjadi pengambilan, pemanfaatan, dan eksploitasi tenaga reproduktif perempuan seperti merawat, membersihkan, memasak, dan memberikan dukungan emosional melalui mekanisme ekonomi global dan arus migrasi internasional. Ketimpangan gender sendiri memiliki arti perbedaan sistemik dalam perlakuan, akses, kesempatan, dan kekuasaan antara gender yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum (Shang, 2022). Norma sosial, konstruksi peran domestik, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum semakin memperkuat kerentanan struktural perempuan termasuk dalam konteks migrasi internasional.

Dalam konteks migrasi internasional, pekerja migran adalah individu yang berpindah ke negara lain untuk bekerja, biasanya karena terbatasnya peluang ekonomi di negara asal serta adanya permintaan tenaga kerja murah dan fleksibel di negara tujuan (Junaidi, 2024). Pekerja perempuan migran yang bekerja di sektor domestik berada di posisi rentan karena pekerjaannya yang diposisikan sebagai *reproductive labor*, yaitu pekerjaan yang dibutuhkan untuk memelihara ulang kehidupan manusia & angkatan kerja baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam reproduksi generasional (Hooi, 2018). Definisi ini mencakup pekerjaan domestik dan perawatan (*care*), seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak, merawat orang tua atau anggota keluarga yang sakit, serta pekerjaan emosional dan sosial yang mendukung keberlangsungan hidup dan produktivitas masyarakat.

Fenomena ini semakin intensif dengan adanya sistem kafala, yaitu mekanisme penjaminan tenaga kerja di banyak negara Teluk yang mengikat status hukum pekerja migran pada seorang sponsor (*kafeel*) (Pande, 2012). Sistem ini membentuk kontrol secara hampir total kepada pemberi kerja atas mobilitas, dokumen, dan kondisi kerja pekerja migran sehingga membentuk asimetri kekuasaan yang ekstrem. Dalam kondisi ini, pekerja migran perempuan berada dalam posisi subordinat tidak hanya sebagai perempuan dan pekerja domestik, tetapi juga sebagai orang asing yang tidak memiliki otonomi hukum.

Pada situasi ketergantungan hukum tersebut, praktik eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang menjadi sangat memungkinkan terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan yang dilembagakan secara struktural. Eksploitasi dapat dilihat sebagai pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil melalui kondisi kerja yang melanggar martabat manusia, termasuk jam kerja berlebihan, upah rendah atau tidak dibayar, pembatasan kebebasan bergerak, penahanan dokumen identitas, serta kekerasan fisik maupun psikologis (ILO, 2011). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa eksploitasi dalam konteks migrasi tenaga kerja tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu pemberi kerja, melainkan juga dari faktor struktural seperti kerentanan status migrasi, ketergantungan ekonomi, lemahnya perlindungan hukum, serta tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif (Crane, 2019). Kondisi ini melahirkan relasi kerja yang timpang, di mana pekerja migran khususnya perempuan, memiliki daya tawar yang sangat terbatas untuk menolak atau melaporkan praktik eksploitatif.

Sementara itu, penyalahgunaan wewenang mengarah pada penggunaan posisi kekuasaan secara sewenang-wenang dengan tujuan untuk mengontrol, menekan, atau merugikan pihak yang berada dalam posisi subordinat, terutama dalam relasi yang tidak setara dan kurangnya akuntabilitas (Barnett, 2005). Dalam konteks ketenagakerjaan migran, penyalahgunaan wewenang seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tindakan melampaui kewenangan hukum (*ultra vires*), pengambilan keputusan secara arbitrer, intimidasi dan ancaman, pembatasan akses

terhadap keadilan, hingga diskriminasi berbasis gender dan ras (Crane, 2019). Ketika pemberi kerja atau aktor negara menggenggam kontrol hampir total atas status hukum, mobilitas, dan akses pekerja migran terhadap perlindungan, kekuasaan tersebut dengan mudah disalahgunakan untuk mempertahankan relasi dominasi.

United Nations Human Rights Council (UNHRC) menjelaskan bahwa praktik eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pekerja migran tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan manifestasi dari kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat ketika kerangka hukum migrasi justru memberikan legitimasi terhadap kontrol berlebihan oleh pemberi kerja serta membatasi otonomi hukum pekerja migran itu sendiri (Human Rights Council, 2025). Dengan demikian, sistem kafala tidak hanya memfasilitasi kondisi kerja yang eksploitatif, tetapi juga menormalisasi penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pengaturan hukum yang menempatkan pekerja migran perempuan dalam posisi ketergantungan dan subordinasi yang berkelanjutan.

Pada tingkat global, organisasi internasional seperti ILO, UN Women, dan UNHRC melihat kerentanan pekerja migran khususnya perempuan di sektor domestik sebagai hasil dari ketimpangan struktural dalam sistem migrasi, ketenagakerjaan, dan rezim hak asasi manusia global. Organisasi internasional memiliki definisi sebagai institusi formal yang dibentuk oleh negara-negara dengan kesepakatan bersama guna mencapai tujuan tertentu dalam sistem internasional, yang memiliki struktur kelembagaan yang berkelanjutan, seperangkat aturan dan prosedur, serta otoritas yang didelegasikan oleh negara anggota untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam tata kelola global (Karns, 2015).

Dalam konteks ini, ILO memandang bahwa pekerja migran, termasuk pekerja domestik, berhak atas *decent work* tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Domestic Workers Convention No. 189 dan Violence and Harassment Convention No. 190. Namun, lemahnya ratifikasi dan implementasi di beberapa negara tujuan membentuk praktik eksploitasi seperti jam kerja berlebihan, upah rendah, penahanan

dokumen, dan kekerasan tetap terjadi (ILO, 2011). UN Women menekankan dimensi gender dari kerentanan tersebut dengan menyoroti bahwa pekerja migran perempuan mengalami diskriminasi berlapis sebagai perempuan, migran, dan pekerja di sektor reproduksi sosial, sehingga lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender, kerja paksa, dan eksklusi dari perlindungan hukum (Hennebry, 2016). Sementara itu, UNHRC menganggap eksploitasi pekerja migran sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dengan memposisikan kewajiban negara baik negara asal maupun negara tujuan guna melindungi hak atas martabat, kebebasan bergerak, kondisi kerja yang adil, dan perlindungan dari perbudakan modern, termasuk dalam konteks sistem migrasi yang restriktif seperti kafala (Human Rights Council, 2011).

Seluruh dinamika tersebut beroperasi dan diperkuat oleh struktur kekuasaan yang berlapis seperti patriarki, kapitalisme global, sistem migrasi internasional, kelas sosial, hubungan negara asal–tujuan, serta perangkat hukum yang bias gender. Struktur kekuasaan dapat diartikan sebagai pola relasi yang terinstitusionalisasi antara negara, pasar tenaga kerja global, norma gender patriarkal, dan rezim hukum migrasi, yang secara sistemik menentukan siapa yang memiliki otoritas, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dikorbankan dalam kebijakan migrasi tenaga kerja (Christou, 2022). Struktur kekuasaan yang berlapis termanifestasi secara nyata dalam pengaturan dan pengalaman hidup pekerja migran perempuan. Manifestasi ini dapat dilihat dalam naturalisasi kerja domestik dan perawatan sebagai “kerja perempuan” yang diremehkan, komodifikasi tenaga kerja migran perempuan sebagai tenaga kerja murah dan fleksibel untuk menopang reproduksi sosial di negara tujuan, serta pembatasan mobilitas dan otonomi hukum dengan adanya kebijakan migrasi yang mengikat status pekerja pada pemberi kerja.

Ketimpangan ini didukung dengan posisi tawar negara asal yang lemah dan ketergantungan pada remitansi, sehingga toleransi terhadap kondisi kerja eksploitatif kerap terjadi. Pada saat yang sama, perangkat hukum yang gagal melindungi pekerja domestik memperparah kerentanan struktural tersebut. Secara keseluruhan, struktur kekuasaan ini menentukan siapa yang memiliki kendali atas tenaga, waktu, mobilitas,

dan tubuh pekerja migran perempuan, sekaligus mengalihkan manfaat ekonomi kepada negara tujuan dan pemberi kerja, sementara beban reproduksi sosial ditanggung secara tidak proporsional oleh pekerja migran perempuan (Christou, 2022).

Dalam membaca struktur kekuasaan tersebut, perspektif postkolonial turut menjadi sudut pandang penting untuk melihat bahwa ketimpangan dalam migrasi tenaga kerja tidak muncul begitu saja tanpa adanya konteks historis. Pendekatan post-kolonial menunjukkan bahwa berakhirnya kolonialisme formal tidak serta-merta menghapus relasi kuasa yang dibentuk selama periode kekaisaran, melainkan justru membentuknya dalam bentuk baru melalui ekonomi politik global, rezim hukum, dan hierarki rasial (Nair, 2017). Dalam hal ini, *Global South* memiliki definisi sebagai negara-negara yang secara historis mengalami kolonialisasi dan saat ini berada dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global, sementara *Global North* merujuk pada negara-negara industri maju yang menempati posisi dominan dalam struktur tersebut. Relasi ini termanifestasi melalui proses rasialisasi terhadap pekerja migran dari *Global South* atau negara berkembang, khususnya Afrika, yang dikonstruksikan sebagai tenaga kerja murah, fleksibel, dan mudah dikontrol. Dengan demikian, eksploitasi pekerja migran perempuan dalam sistem kafala tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan kebijakan atau kegagalan perlindungan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari keberlanjutan struktur postkolonial yang menormalisasi ketimpangan berbasis ras, gender, dan asal negara.

Relasi kuasa sendiri dapat diartikan sebagai dinamika kekuasaan yang terbentuk “dalam dan melalui relasi sosial,” di mana negara-negara, melalui berbagai bentuk interaksi baik bilateral maupun multilateral, termasuk institusi global, perdagangan, diplomasi, aliansi, maupun ancaman membangun dan mempraktikkan kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan nasib, kebijakan, serta kondisi aktor lain dalam sistem internasional (Barnett, 2005). Relasi kuasa hadir dari ketimpangan dalam akses terhadap ekonomi, hukum, pengetahuan, dan legitimasi sosial, sehingga membentuk posisi dominan dan subordinat. Dalam migrasi domestik

internasional, relasi kuasa termanifestasi melalui ketergantungan pekerja migran pada pemberi kerja, negara tujuan, dan sistem hukum yang mengatur status mereka yang keseluruhannya memperkuat kerentanan perempuan migran.

Konsep Ketimpangan Gender dalam Ekstraksi Tenaga Reproduksi Global berakar pada tiga kerangka teoritis besar, yaitu Neo-Marxisme, *World-System Theory*, dan *Global Care Chain* dalam tradisi Feminisme Marxis. Neo-Marxisme muncul untuk merespon Marxisme klasik yang dinilai terlalu berfokus pada eksploitasi kelas dalam ruang lingkup negara-bangsa, dengan mengabaikan bagaimana relasi kuasa global turut membentuk ketimpangan ekonomi kontemporer. Berangkat dari kritik tersebut, Neo-Marxisme menunjukkan bahwa dinamika eksploitasi pada era modern berlangsung melalui struktur kapitalisme global yang bersifat hierarkis, di mana negara-negara kaya (*core*) menempatkan negara-negara miskin (*periphery*) dalam posisi subordinat melalui berbagai mekanisme ekonomi, politik, dan institusional (Frank, 1966). Dalam struktur tersebut, negara-negara pinggiran dijadikan sebagai pemasok tenaga kerja murah, komoditas primer, dan surplus value yang menopang akumulasi modal negara-negara industri. Andre Gunder Frank menjelaskan proses tersebut sebagai *the development of underdevelopment*, yakni kondisi ketika perkembangan ekonomi negara *core* justru bergantung pada keterbelakangan negara *periphery*.

Pandangan ini diperkuat oleh *World-System Theory* yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa dunia modern tidak terdiri atas negara-negara yang berkembang secara terpisah, tetapi membentuk sebuah sistem ekonomi tunggal yang terintegrasi dan hierarkis (Wallerstain, 2011). Sistem ini muncul melalui ekspansi kapitalisme sejak abad ke-16, membentuk pembagian kerja internasional yang memisahkan negara ke dalam tiga kategori yaitu *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*. Negara *core* menguasai teknologi maju, modal besar, dan bentuk produksi bernilai tinggi, sementara negara *periphery* bergantung pada ekspor komoditas primer, tenaga kerja murah, dan aktivitas ekonomi berupah rendah yang dapat dieksploitasi dengan intensitas tinggi. *Semi-periphery* berfungsi sebagai

posisi antara tidak sepenuhnya dominan seperti *core*, tetapi memiliki kapasitas kapital, politik, dan militer yang cukup untuk mendominasi negara *periphery* (Wallerstain, 2011).

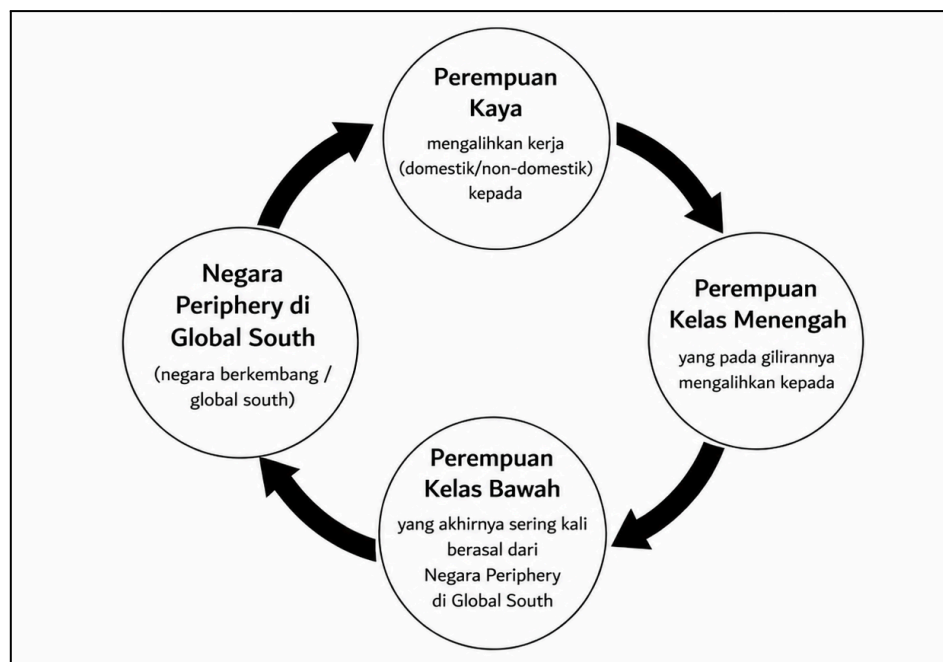
Analisis Feminisme Marxis semakin memperjelas bagaimana mekanisme ini bekerja melalui interaksi antara kapitalisme dan patriarki. Feminisme Marxis percaya bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya melalui gender seperti dalam feminisme liberal, maupun semata-mata melalui hubungan produksi dalam Marxisme klasik. Bagi mereka, subordinasi perempuan adalah hasil dari interaksi dialektis antara kapitalisme dan patriarki, dua sistem yang saling menopang (Bieler, 2024). Kapitalisme membutuhkan tenaga kerja yang terus-menerus direproduksi melalui pengasuhan anak, perawatan rumah, pemenuhan kebutuhan emosional, serta pemeliharaan tubuh pekerja namun menempatkan kerja reproduktif ini sebagai sesuatu yang “alami,” tidak berupah, dan dilakukan oleh perempuan. Patriarki kemudian memberikan legitimasi kultural bahwa perempuan “seharusnya” melakukan pekerjaan domestik, sementara kapitalisme memperoleh keuntungan ekonomi dari invisibilitas dan gratisnya kerja tersebut.

Dalam konteks ini, kerja reproduktif perempuan dipandang sebagai fondasi keberlanjutan sistem kapitalis, karena tanpa reproduksi tenaga kerja, produksi kapitalis tidak akan dapat berjalan. Namun ketika perempuan kelas menengah dan kelas atas di negara kaya memasuki pasar kerja formal, beban reproduksi sosial mereka tidak hilang, tetapi dialihkan kepada perempuan dari kelas bawah dan negara *periphery*. Proses ini menciptakan apa yang disebut sebagai *global care chain*, yaitu rantai perawatan global yang memindahkan beban kerja domestik dari perempuan kaya ke perempuan miskin lintas negara dalam struktur kapitalisme global.

Menurut Arlie Hochschild, konsep *global care chain* (rantai perawatan global) menjelaskan bagaimana kerja perawatan dan kerja reproduktif seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, dan merawat orang lanjut usia dialihkan secara berjenjang dari perempuan kaya kepada perempuan yang lebih miskin, sering kali melintasi batas negara. Konsep ini muncul dari pengamatan bahwa kerja reproduktif

adalah fondasi keberlanjutan sistem kapitalisme, karena sistem produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja yang terus direproduksi dan dirawat (Orozco, 2009). Akan tetapi, di negara-negara kaya atau berkembang yang kelas menengahnya meningkat, perempuan mulai memasuki pasar kerja formal dalam jumlah besar. Ketika mereka bekerja di sektor profesional, beban kerja reproduktif tidak hilang, tetapi dialihkan kepada perempuan lain yang bersedia mengisi celah tersebut dengan upah murah dan inilah yang kemudian membentuk rantai perawatan global:

Gambar 1.2 Siklus Delegasi Kerja Domestik *Global Care Chain*



Sumber: Orozco, 2009

Dalam konteks relasi Ethiopia dan Arab Saudi, pola *global care chain* ini terlihat jelas melalui migrasi besar-besaran perempuan Ethiopia ke sektor domestik di Arab Saudi. Perempuan kelas menengah dan atas di Arab Saudi yang semakin terlibat dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan publik mengalihkan tanggung jawab kerja domestik dan perawatan kepada pekerja migran perempuan. Pekerjaan

domestik seperti membersihkan rumah, mengasuh anak, merawat lansia, dan mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari kemudian dibebankan kepada perempuan Ethiopia yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan negara periferi. Dalam proses ini, kerja perawatan mereka dihargai dengan upah rendah, jam kerja panjang, serta perlindungan yang minim.

Migrasi perempuan Ethiopia ke Arab Saudi juga dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan struktural di negara asal, sehingga bekerja di sektor domestik di luar negeri dipandang sebagai strategi bertahan hidup. Namun, dalam struktur *global care chain*, posisi mereka berada pada mata rantai terbawah yang paling rentan terhadap eksploitasi. Ketergantungan keluarga di Ethiopia terhadap remitansi semakin memberikan tekanan bagi perempuan migran untuk bertahan dalam kondisi kerja yang tidak adil. Dengan demikian, pengalaman pekerja migran perempuan Ethiopia di Arab Saudi menunjukkan bagaimana rantai perawatan global tidak hanya memindahkan beban kerja reproduktif lintas negara, tetapi juga mereproduksi ketimpangan kelas, gender, dan global secara sistematis dalam sistem kapitalisme internasional.

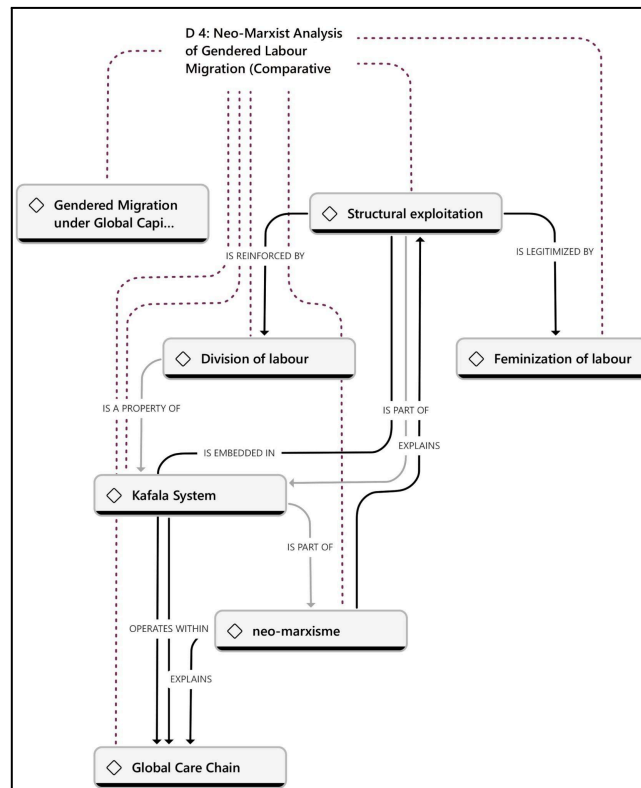
1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini melihat bagaimana Ethiopia ditempatkan sebagai negara periferi dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga migrasi menjadi strategi bertahan hidup bagi perempuan. Sebaliknya, Arab Saudi diposisikan sebagai negara tujuan utama dalam *regime care economy* yang bergantung pada tenaga kerja domestik murah, informal, dan minim perlindungan. Relasi yang bersifat timpang ini sejak awal telah menempatkan pekerja migran perempuan dalam posisi tawar yang lemah, yang turut diperkuat oleh hierarki sosial berbasis ras, kebangsaan, dan warna kulit, serta konstruksi patriarki yang memarginalkan perempuan dalam sektor kerja domestik yang privat dan tertutup.

Penelitian ini juga berasumsi bahwa praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Ethiopia dapat dilihat sebagai produk dari interaksi antara sistem kafala, relasi *global care chain*, dan ketergantungan ekonomi Ethiopia-Arab Saudi. Ketergantungan Ethiopia pada remitansi dan kebutuhan Arab Saudi akan tenaga kerja murah mempertahankan sistem migrasi yang timpang dan memperlakukan pekerja sebagai komoditas yang mudah digantikan. Maka dari itu, keberlanjutan ketidakadilan gender dalam migrasi ini bukan sekadar akibat kegagalan reformasi, melainkan merupakan produk dari struktur ekonomi-politik global yang sedari awal tidak memihak kelompok rentan dan secara sistematis mereproduksi subordinasi perempuan.

1.7 Kerangka Analisis

Gambar 1.3 Kerangka Analisis Relasi Ketidakadilan Gender dan Kekuasaan dalam Isu Pekerja Migran Perempuan Ethiopia di Arab Saudi



Penelitian ini dibangun dengan menempatkan Neo-Marxisme sebagai landasan teoritis utama untuk menjelaskan migrasi tenaga kerja perempuan Ethiopia ke Arab Saudi sebagai fenomena yang tertanam dalam struktur ekonomi politik global. Pendekatan Neo-Marxisme digunakan untuk melihat bagaimana *global care chain* dan feminisasi tenaga kerja beroperasi dalam sistem kapitalisme global yang bergantung pada tenaga kerja perempuan migran berupah rendah. Neo-Marxisme melihat bahwa migrasi tidak dilihat sebagai pilihan individual, melainkan sebagai bagian dari relasi produksi global yang membentuk ketimpangan berbasis kelas, gender, dan kewarganegaraan.

Konsep *global care chain* dalam neo-Marxisme turut menjadi arena struktural eksploitasi berlangsung. *Global care chain* ini terbentuk melalui pembagian kerja yang terstratifikasi, di mana perempuan dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (*global south*) ditempatkan sebagai penyedia kerja perawatan dan domestik di negara tujuan. Dalam konteks ini, sistem kafala hadir sebagai mekanisme hukum yang mengatur dan mengendalikan tenaga kerja migran di dalam *global care chain*, dengan mengikat status hukum pekerja pada pemberi kerja. Kafala tidak hanya membentuk pembagian kerja berbasis gender dan ras, tetapi juga mempertegas eksploitasi struktural melalui pembatasan mobilitas, kontrol dokumen, dan ketergantungan legal pekerja migran pada sponsor.

Sistem kafala memungkinkan terjadinya eksploitasi yang bersifat sistemik karena dijalankan dan ditegakkan melalui aturan hukum dan institusi negara di negara tujuan, serta ditoleransi dan difasilitasi oleh negara asal, dalam hal ini Ethiopia. Ethiopia dapat dilihat sebagai aktor negara, dimana negara tidak berperan sebagai aktor yang netral, melainkan menjadi bagian dari struktur yang membentuk dan mempertahankan ketimpangan relasi kuasa dalam migrasi tenaga kerja internasional. Ketika negara tujuan menerapkan sistem kafala melalui regulasi dan negara asal mendorong migrasi dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi, maka ketimpangan tersebut menjadi sesuatu yang dilembagakan dan dianggap wajar.

Di titik inilah legitimasi terhadap sistem kafala tidak hanya dibangun melalui aturan hukum, tetapi juga melalui pembentukan narasi yang membingkai migrasi sebagai peluang ekonomi (*economic opportunity*). Narasi ini menjadi wacana dominan yang digunakan untuk membenarkan migrasi tenaga kerja perempuan, dan diperkuat melalui pemberitaan media serta laporan lembaga internasional seperti World Bank yang menekankan peran remitansi bagi pembangunan ekonomi. Namun, narasi peluang ekonomi tersebut bertentangan dengan realitas yang dihadapi pekerja migran perempuan di lapangan. Fokus pada remitansi dan motivasi ekonomi cenderung menutupi kondisi kerja yang tidak manusiawi, relasi kuasa yang timpang, serta minimnya perlindungan hak yang dialami pekerja migran perempuan di bawah sistem kafala.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa migrasi tenaga kerja perempuan Ethiopia ke Arab Saudi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara struktur kapitalisme global, mekanisme hukum ketenagakerjaan, peran negara, dan produksi diskursus pembangunan. Pendekatan neo-Marxis menghadirkan kemungkinan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana eksploitasi tenaga kerja perempuan direproduksi, dilegitimasi, dan dinormalisasi, sekaligus menunjukkan bahwa migrasi bukan sekadar strategi ekonomi individual, melainkan bagian dari sistem global yang diliputi oleh ketimpangan struktural